



# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 36 TAHUN 2009

### TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2010, perlu disiapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Ususan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang ketujuh dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 / PMK.2 / 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### **MEMUTUSAKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- d. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- e. Satuan biaya adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara professional sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

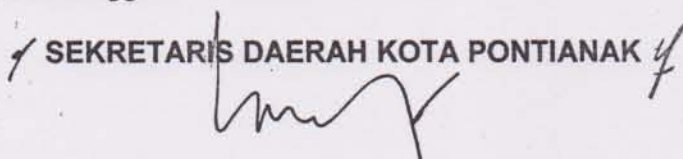
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 September 2009

 **WALIKOTA PONTIANAK** *ks*  
  
H. SUTARMIDJI, SH M.Hum

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 September 2009

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK** *4*

 Ir. H.TONI HERIANTO, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 198003 1 016

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2009 NOMOR 36**



Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 36 TAHUN 2009  
 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2010 Rp.	K E T
1	2	4	6	7
I	<b>HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ( PPA )</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	260,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	365,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	415,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	470,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	520,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	600,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	650,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	755,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	915,000	
	<b>2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	230,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	345,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	460,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	515,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	575,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	630,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	745,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	910,000	
	<b>3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	290,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	345,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	515,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	575,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	690,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	800,000	
	<b>4. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	205,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	295,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	405,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	465,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	520,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	580,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	695,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	805,000	



1	2	4	6	7
	<b>5. BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	165,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	240,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	290,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	325,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	365,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	400,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	460,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	690,000	
	<b>6. BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAN PEMBANTU</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	155,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	225,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	265,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	335,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	370,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	410,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	485,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	595,000	
	<b>7. BENDAHARA PENGELUARAN GAJI</b>	Orang/Bulan	200,000	
	<b>8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN GAJI</b>	Orang/Bulan	150,000	
	<b>9. PENYIMPAN BARANG</b>	Orang/Bulan	250,000	
	<b>10. PENGURUS BARANG</b>	Orang/Bulan	250,000	
	<b>11. OPERATOR KOMPUTER SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH</b>	Orang/Bulan	200,000	
	<b>12. STAF PENGELOLA</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	115,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	175,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	205,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	230,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	260,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	290,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	320,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	375,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	460,000	
	<b>13. ASISTEN TEKNIS/PENGELOLA TEKNIS</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	110,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	170,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	200,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	225,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	255,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	285,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	315,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	370,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	455,000	



1	2	4	6	7
	<b>14. STAF TEKNIS</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	105,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	165,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	195,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	220,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	250,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	280,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	310,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	365,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	450,000	
	<b>15. STAF ADMINISTRASI</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	160,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	190,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	215,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	245,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	275,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	305,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	360,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	445,000	
ii	<b>HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	<b>1. PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA</b>			
	Pejabat Pengadaan untuk pengadaan di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp 50 juta, maksimum 1 orang.	Orang/Bulan	180,000	
	<b>2. PANITIA /UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) :</b>			
	<b>2.1 KETUA PANITIA</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	182,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	272,500	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	320,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	362,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	410,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	455,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	500,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	592,500	
	<b>2.2 SEKRETARIS :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	157,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	247,500	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	295,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	337,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	385,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	430,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	475,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	567,500	



1	2	4	6	7
	<b>2.3 ANGGOTA :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	132,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	222,500	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	270,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	312,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	360,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	405,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	450,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	542,500	
	<b>3. PANITIA /UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) :</b>			
	<b>3.1 KETUA PANITIA :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	137,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	170,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	237,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	272,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	302,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	332,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	375,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	440,000	
	<b>3.2 SEKRETARIS :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	112,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	145,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	212,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	247,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	277,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	307,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	350,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	415,000	
	<b>3.3 ANGGOTA :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	87,500	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	120,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	187,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	222,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	252,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	282,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	325,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	390,000	
	<b>4. PANITIA /UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA LAINNYA :</b>			
	<b>4.1 KETUA PANITIA :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	120,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	170,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	237,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	272,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	302,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	332,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	375,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	440,000	




1	2	4	6	7
	<b>4.2 SEKRETARIS :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	95,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	145,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	212,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	247,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	277,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	307,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	350,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	415,000	
	<b>4.2 ANGGOTA :</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	70,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	120,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	187,500	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	222,500	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	252,500	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	282,500	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	325,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	390,000	
	<b>5. Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.</b>	Orang/Hari	50,000	
	Nilai Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 500 juta ( Maksimum 9 Hari)			
III.	<b>HONOR PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA</b>			
	1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta sd. 200 juta	Orang/Bulan	115,000	
	2. Pengadaan barang diatas Rp.500 juta atau Jasa konsultan diatas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	175,000	
IV	<b>HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>			
	1. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	365,000	
	2. Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	260,000	
	3. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50,000	
	4. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	45,000	
	5. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	35,000	
	6. Peneliti Pratama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	30,000	
	7. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang/Jam	27,000	
	8. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	20,000	
	9. Pengolah Data	Penelitian	1,330,000	
	10. Petugas Survey	Orang/Rsponden	7,000	
	11. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	67,000	
V	<b>HONOR KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI :</b>			
	1. NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA :			
	a. Pejabat setingkat Walikota/Wakil Walikota	Orang/Jam	1,400,000	
	b. Pejabat Eselon II A	Orang/Jam	1,150,000	
	c. Pejabat Eselon II B	Orang/Jam	850,000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	700,000	
	3. Moderator	Orang/Jam	575,000	
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1,150,000	



1	2	4	6	7
VI	<b>HONOR PENYULUH NON PNS</b>			
	1. SLTA	Orang/Bulan	1,300,000	
	2. SARJANAMUDA	Orang/Bulan	1,500,000	
	3. SARJANA	Orang/Bulan	1,650,000	
	4. MASTER (S2)	Orang/Bulan	1,800,000	
VII	<b>HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM&amp;CLEANING</b>			
	1. Satpam/pengamanan kantor, Pengemudi, Pramubakti, Pegawai Tidak Tetap/Bukan Pegawai Negeri Sipil.	Orang/Bulan	800,000	
VIII	<b>HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah:</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	700,000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	650,000	
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	<b>2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran :</b>			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	450,000	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	400,000	
	c. Ketua / wakil ketua	Orang/Bulan	350,000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	e. Anggota	Orang/Bulan	300,000	
IX	<b>HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT</b>			
	1. Penanggung jawab / Pembina	Orang/Kali	400,000	
	2. Ketua/wakil ketua	Orang/Kali	350,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kali	300,000	
	4. Anggota	Orang/Kali	300,000	
X	<b>HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL / MAKALAH</b>			
	1. Penanggung jawab	Orang/Ter	400,000	
	2. Redaktur	Orang/Ter	300,000	
	3. Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000	
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	175,000	
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Ter	160,000	
	6. Sekretariat	Orang/Ter	150,000	
	7. Pembuat artikel / Makalah	Halaman	100,000	
XI	<b>HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>			
	1. Penanggung jawab	Orang/Ter	400,000	
	2. Redaktur	Orang/Ter	300,000	
	3. Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000	
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	175,000	
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Ter	160,000	
	6. Sekretariat	Orang/Ter	150,000	
	7. Pembuat artikel / Makalah	Halaman	75,000	

1	2	4	6	7
XII	<b>HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	1. Penanggung jawab	Orang/Bulan	500,000	
	2. Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	3. Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400,000	
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Bulan	350,000	
	5. Sekretariat	Orang/Bulan	300,000	
	6. Pembuat artikel	Halaman	100,000	
	7. Penerjemah	1500 Karakter	85,000	
XIII	<b>VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naska/Pelajaran	95,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200,000	
	2. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naska/Pelajaran	110,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250,000	
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naska/Pelajaran	100,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250,000	
	4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naska/Pelajaran	100,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250,000	
XIV	<b>HONOR INSTRUKTUR</b>	Orang/Jam	60,000	
XV	<b>TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
	1. <b>UANG LEMBUR</b> (di luar jam kerja pada hari kerja)			
	a. Golongan I	Orang/Jam	7,000	
	b. Golongan II	Orang/Jam	9,000	
	c. Golongan III	Orang/Jam	11,000	
	d. Golongan IV	Orang/Jam	13,000	
	2. <b>UANG MAKAN LEMBUR</b>	Orang	20,000	


 WALIKOTA PONTIANAK *ts*  
  
H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum



Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 36 TAHUN 2009  
 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2010 Rp.	K E T
1	2	4	6	7
I	UANG MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Orang/Hari	5,000	
II	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Hari	7,500	
III	PAKAIAN DINAS :			
	1. Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk atribut & ongkos jahit) :			
	a. PSH ( Pejabat Negara, Eselon II dan III)	Orang/Stel/Tahun	800,000	
	b. PDL	Orang/Stel/Tahun	275,000	
	c. Baju Batik Khas Daerah/Korpri	Orang/Stel/Tahun	175,000	
	3. Dokter/Perawat (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel/Tahun	250,000	
	4. Sopir/Pesuruh (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel/Tahun	225,000	
	5. Satpol PP/Satpam (Termasuk Perlengkapannya)	Orang/Stel/Tahun	375,000	
IV	SEWA KENDARAAN DAN BANGUNAN/GEDUNG :			
	1. Sewa Ruang Besar	Hari	1,500,000	
	2. Sewa Ruang Kecil	Hari	750,000	
	3. Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	1,000,000	
	4. Sewa Mesin Fotocopy	Bulan/Unit	3,278,000	
	5. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500,000	
	6. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 orang	Unit/Hari	1,700,000	
	7. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 orang	Unit/Hari	2,550,000	
	8. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	15,000,000	
V	UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	Orang/Hari	110,000	
VI	KONSUMSI RAPAT DI KANTOR			
	1. Makan	Orang/Kali	26,000	
	2. Snack	Orang/Kali	10,000	
VII	PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	1. Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dan Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
	2. Dari Bahasa Indonesia ke Asing'			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	



1	2	4	6	7
VIII	<b>PERCETAKAN DAN PENJILIDAN</b>			
	Untuk standar biaya cetakan dan penjilidan dapat dilihat pada Pedoman standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Ptk			
IX	<b>PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	1. Pejabat Negara (2.500 cc)	Unit	500,000,000	
	2. Eselon II A (2.000 cc)	Unit	350,000,000	
	3. Eselon II B (1.800 cc)	Unit	190,000,000	
	4. Eselon III (1.500 cc)	Unit	150,000,000	
	5. Operasional Kantor/Lapangan :			
	a. Bus Roda 6 (4,000 cc)	Unit	750,000,000	
	b. Roda 6/ Tiga per empat	Unit	475,000,000	
	c. Truk Roda 6 (4.000 cc) :			
	- Dump Truck	Unit	275,000,000	
	- Truck Chasis + Bak Terbuka (130 HP)	Unit	225,000,000	
	d. Roda 4/ Minibus (1.500-2.000 cc)	Unit	250,000,000	
	e. Kendaraan Operasional Lapangan (Doble Garden)	Unit	300,000,000	
	f. Pickup (1500 – 2000 cc)	Unit	130,000,000	
	g. Roda 2 (100 – 150 cc)	Unit	20,000,000	
	h. Motor Trail (125 – 150 cc)	Unit	25,000,000	
X	<b>DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL</b>			
	1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Orang/Angkatan	19,000,000	
	2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Orang/Angkatan	13,240,000	
	3. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Orang/Angkatan	11,600,000	
XI	<b>LATIHAN PRAJABATAN</b>			
	1. Golongan III (Lama Diklat 22 Hari)	Orang/Angkatan		
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)		2,415,000	
	b. CPNS Eks Honorer (lama Diklat 24 hari)		3,645,000	
	2. Golongan I & II (Lama Diklat 10 Hari)	Orang/Angkatan		
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 10 hari)		1,650,000	
	b. CPNS Eks Honorer (lama Diklat 19 hari)		2,670,000	
XII	<b>DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS</b>	Orang	5,000,000	
	(Kontribusi Per Peserta).			
XIII	<b>DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT NON INSTITUSIONAL</b>	Orang/Hari	350,000	
XIV	<b>KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI</b>			
	1. Jenjang Pendidikan D I - D III .	Orang/Bulan	800,000	
	2. Jenjang Pendidikan D IV -S1	Orang/Bulan	£50,000	
	3. Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1	Orang/Bulan	1,050,000	
	4. Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2	Orang/Bulan	1,050,000	

WALIKOTA PONTIANAK ts  
  
H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum



Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2010 Rp.	K E T
1	2	4	6	7
I	<b>PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</b>			
	1. Pemeliharaan Gedung/bANGUNAN Kantor	M2/Tahun	80,000	
	2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	10,000	
II	<b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN</b>			
	1. Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	26,000,000	
	b. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3,000,000	
	c. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	16,350,000	
	d. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	18,150,000	
	2. Speedboat	Unit/Tahun	12,600,000	
III	<b>LAIN-LAIN PEMELIHARAAN</b>			
	1. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	45,000	
	2. Personal Komputer/Laptop, dan Printer	Unit/Tahun	700,000	
	3. Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	2,000,000	
	4. Pemeliharaan AC / AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	350,000	
	5. Pemeliharaan AC / AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	600,000	
	6. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	4,550,000	
	7. Genset diatas 50 sampai dengan 150 KVA	Unit/Tahun	9,000,000	
	8. Genset diatas 150 KVA	Unit/Tahun	9,000,000	
	9. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	36,300,000	
	10. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2	Unit/Tahun	2,480,000	

WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH.M.Hum



Lampiran IV : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 36 TAHUN 2009

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

I. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Pejabat Daerah *	Eselon II A	Eselon IIB dan Anggota DPRD	Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	KELUAR DAERAH/PROPINSI :						
	a. Penginapan dan makan	550,000	500,000	450,000	350,000	300,000	250,000
	b. Angkutan Setempat	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	c. Uang Saku	300,000	300,000	300,000	300,000	250,000	200,000
	d. Tiket Pesawat (Satu kali)	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000

\* Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

II. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Pejabat Daerah *	Eselon II A	Eselon IIB dan Anggota DPRD	Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	KEDALAM DAERAH (DALAM PROPINSI) :						
	a. Penginapan dan makan	400,000	375,000	340,000	250,000	225,000	190,000
	b. Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	c. Uang Saku	250,000	250,000	250,000	250,000	170,000	150,000
	d. Tiket Hanya Berlaku Untuk :						
	1. Pontianak - Ketapang (satu kali)	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	2. Pontianak - Kapuas Hulu (satu kali)	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000

\* Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

III. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	PERJALANAN DINAS PERGI - PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM DALAM KOTA	50,000	45,000	40,000	35,000

WALIKOTA PONTIANAK *ts*

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum



Lampiran V : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA

<p><b>A.</b></p> <p><b>I.</b></p> <p><b>II.</b></p> <p><b>III.</b></p> <p><b>IV.</b></p>	<p><b>BELANJA PEGAWAI :</b></p> <p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing satuan kerja berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. KPA/PPA/PPK/PPTK ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan APBD.</p> <p>b. Bagi Pengelola kegiatan : PPA, PKPA, PPTK, PPK, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) kegiatan yang dikelolanya.</p> <p>c. Pada Satker Yang Hanya Mengelola Gaji : Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan gaji di lingkungan satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>d. Penyimpan dan Pengurus Barang diberikan honorarium kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan barang di lingkungan satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>e. Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disetiap SKPD dapat diberikan honorarium maksimum untuk 2 (dua) orang Operator SIKD.</p> <p>Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa <u>sampai dengan</u> nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.</p> <p>b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai pagu <u>di atas</u> Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p> <p>c. Menggunakan satuan orang per bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan untuk setiap paket kegiatan yang dilelangkan.</p> <p>Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan satuan orang/ bulan (OB). Honorarium diberikan bila mana ada barang/jasa yang diperiksa/diterima oleh panitia.</p> <p>Honorarium Kegiatan Penelitian. Honorarium Peneliti dan Pembuat Peneliti (Non Fungsional Peneliti) diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal, paling banyak 4 (empat) jam sehari.</p>
--	---



V.	<p>Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi. Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD/satuan kerja lainnya. Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar.</p>
VI.	<p>Honorarium Penyuluh Non PNS Honorarium diberikan kepada pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
VII.	<p>Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam, PTT, Cleaning Service dan Tenaga Kurir Lepas. Satuan biaya bagi pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.</p>
VIII.	<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD, kegiatan yang bersifat insidental dan hanya 1 kali kegiatan</p>
IX.	<p>Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksanaan kegiatan berdasarkan surat keputusan Walikota.</p>
X.	<p>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Walikota. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p>
XI.	<p>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan surat keputusan Walikota. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
XII.	<p>Honorarium Tim Pengelola Website. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan Walikota.</p>
XIII.	<p>Vakasi Penyelenggara Ujian Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p>

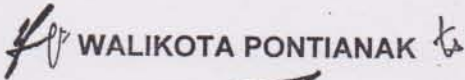



XIV.	Honorarium Instruktur Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan Walikota bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.
XV.	Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur : Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. c. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif lembur hari kerja.
B.	<b>BELANJA BARANG :</b>
I.	Uang Makan Minum Harian PNS. Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
II.	Makan Penambah Daya Tahan Tubuh Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh. Diberikan kepada pegawai seperti tenaga fungsional computer, laboratorium, tenaga perpustakaan, Satuan Polisi Satuan Pramong Praja, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut.
III.	Pakaian Dinas : a. Kerja Resmi Pegawai Diperuntukkan bagi PNS pada satuan kerja yang tugas pokoknya berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per tahun. Satuan biaya <b>sudah termasuk</b> atribut dan ongkos jahit. b. Dokter/Perawat Diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaanya secara selektif. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per tahun. c. Sopir/Pesuruh. Diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat sesuai ketentuan dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. d. Satpol PP/Satpam. Pakaian Satpol PP/satpam sudah termasuk perlengkapannya paling banyak dapat diberikan sebanyak 2 (dua) stel per tahun.



<p>IV.</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>V.</p> <p>VI.</p> <p>VII.</p> <p>VIII.</p> <p>IX.</p> <p>X.</p>	<p><b>Sewa Kendaraan dan Ruangan/Gedung :</b></p> <p>Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.</p> <p><b>Ruangan dan Gedung Pertemuan</b> Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor. Definisi ruangan dan gedung pertemuan :</p> <p>Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.</p> <p>Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.</p> <p>Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.</p> <p>Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.</p> <p>Satuan biaya sudah termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.</p> <p><b>Uang Transport Kegiatan Dalam Kota</b> Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun non pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, dan atau kegiatan lain yang serupa. Untuk PNS, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak tersedia kendaran dinas,</li><li>- Disertai surat tugas</li><li>- Tidak bersifat rutin</li></ul> <p><b>Konsumsi Rapat di Kantor :</b> Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.</p> <p><b>Penerjemahan dan Pengetikan</b> Biaya yang dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.</p> <p><b>Percetakan dan Penjilidan</b> Biaya percetakan dan penjilidan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.</p> <p><b>Pengadaan Kendaraan Operasional</b> Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, tidak mewah, hemat efisien dan efektif.</p> <p><b>Diklat Pimpinan/Struktural</b> Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak. Untuk Diklat Pim III dan IV satuan biaya belum termasuk biaya observasi lapangan.</p>
---	--

XI.	<p>Latihan Prajabatan Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak.</p>
XII.	<p>Komponen tunjangan biaya hidup beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Program Non Gelar/Gelas Dalam Negeri (DI, DIII, DIV/S1) Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV atau setara 1 dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</li><li>b. Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri (S2/Sp-1 dan S3/Sp-2) Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana (strata 2 atau Stata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</li></ul>
C.	<p><b>BELANJA PEMELIHARAAN :</b></p>
I.	<p>Pemeliharaan Gedung/Bangunan Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)</p>
II.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, dan speedboat sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p>
III.	<p>Lain-Lain Pemeliharaan Pemeliharaan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan patroli jalan raya sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM).</p>
D.	<p><b>BELANJA PERJALANAN DINAS :</b></p>
I.	<p>Pejabat Daerah Pejabat Daerah terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.</p>

 WALIKOTA PONTIANAK

  
H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum